
ANALISIS MODEL *ONION* JEJARING KEBIJAKAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KABUPATEN SUBANG

Gresia Rachel T¹; Sintiya Nurjanah²; Jihan Faizah S³; Laura Prasastiningtyas⁴

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

[1gresiarachel0@students.undip.ac.id](mailto:gresiarachel0@students.undip.ac.id); [2sintiyanurjanah@students.undip.ac.id](mailto:sintiyanurjanah@students.undip.ac.id);

[3jihanfaizahseptiany@students.undip.ac.id](mailto:jihanfaizahseptiany@students.undip.ac.id); [4louraprasastiningtya@students.undip.ac.id](mailto:louraprasastiningtya@students.undip.ac.id)

ABSTRAK

Jejaring suatu kebijakan dengan pendekatan jaringan penting sehingga dapat masalah sosial yang bersifat kompleks serta merencanakan kebijakan dengan menggunakan pemberdayaan masyarakat seperti Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Tujuan utama penelitian ini adalah memahami struktur dan dinamika jaringan kebijakan yang terlibat dalam program KOTAKU, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Model Onion digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengungkap berbagai lapisan aktor dan interaksi yang terjadi dalam jaringan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen terkait kebijakan serta program untuk memperkaya pemahaman. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan program KOTAKU sangat dipengaruhi oleh sinergi antar aktor dalam jaringan kebijakan. Lapisan-lapisan dalam Model Onion mengungkapkan adanya peran penting dari koordinasi antar lembaga, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan kebijakan di tingkat lokal dan nasional. Hambatan yang diidentifikasi meliputi kendala birokrasi, keterbatasan sumber daya, serta resistensi perubahan di tingkat komunitas. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dan integratif dalam implementasi program KOTAKU.

Kata Kunci : Jejaring Kebijakan, Partisipasi Masyarakat, Implementasi Program

ABSTRACT

Policy networks with a network approach are important in solving complex social problems and designing policies based on community empowerment such as the City Without Slums Program (KOTAKU). The main objective of this research is to understand the structure and dynamics of the policy network involved in the KOTAKU program, as well as identifying the factors that influence its implementation. The Onion Model is used as an analytical framework to reveal the various layers of actors and interactions that occur in the policy network. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data was obtained through analysis of documents related to policies and programs to enrich understanding. The analysis results show that the success of the KOTAKU program is greatly influenced by the synergy between actors in the policy network. The layers in the Onion Model reveal the important role of inter-agency coordination, active community participation, and policy support at the local and national levels. Barriers identified include bureaucratic constraints, limited resources, and resistance to change at the community level. The conclusions of this research emphasize the importance of a collaborative and integrative approach in implementing the KOTAKU program.

Keywords : Policy Networks, Community Participation, Program Implementation

PENDAHULUAN

Pertumbuhan populasi dan urbanisasi telah meningkat dengan cepat dalam beberapa dekade terakhir, banyak kota di Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan. Migrasi dari desa ke kota untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik menjadi salah satu penyebab utamanya. Namun, laju pembangunan infrastruktur dan perumahan tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk mengakibatkan munculnya kawasan-kawasan kumuh di berbagai kota besar.

Permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh membuat pemerintah untuk bergerak lebih cepat dalam membuat program pembangunan. Program pemerintah dalam pembangunan permukiman yaitu Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah sebuah inisiatif dari pemerintah Indonesia yang dirancang untuk mengurangi jumlah kawasan kumuh di perkotaan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) diluncurkan pada tahun 2015 sebagai bagian dari upaya mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) komitmen nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang melibatkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat (lembaga Badan Keswadayaan Masyarakat) dengan tujuan untuk menciptakan solusi yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek tetapi juga dapat dipertahankan dalam jangka panjang dan memastikan bahwa intervensi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat, sehingga hasilnya lebih diterima dan didukung oleh penduduk setempat.

Mengingat pentingnya permasalahan perumahan dan kawasan kumuh yang melibatkan berbagai aktor sehingga membentuk jejaring kebijakan yang luas dan perlu adanya strategi khusus, penulis memilih untuk melakukan penelitian berjudul: "***Analisis Onion Jejaring Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) DI KABUPATEN SUBANG***". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis jejaring kebijakan dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang dengan model analisis Onion untuk mempermudah keterkaitan antar aktor dalam proses jejaring kebijakan.

METODE

Pada penelitian ini kami akan menggunakan metode Kualitatif dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran variabel yang akan diteliti. pada penelitian ini penulis menggunakan kualitatif dengan pengamatan dan identifikasi melalui penelitian-penelitian terdahulu dengan tujuan mengidentivestigasi dan memahami fenomena apa yang sedang terjadi pada implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang.

Pendekatan kualitatif yang berbasis pada dokumen-dokumen terdahulu yang akan dikaji ulang oleh peneliti. pada penelitian ini kami menggunakan model kebijakan jejaring onion guna melihat bagaimana struktur hubungan antara berbagai aktor dalam proses kebijakan publik sebagai lapisan-lapisan yang saling berinteraksi.

Yaitu dengan adanya beberapa lapisan dalam model onlion terdiri dari :

1. lapisan into (Core Layer/Primary Stakeholder):

Pengambil Keputusan Utama: Termasuk pejabat pemerintah, politisi, dan birokrasi tingkat tinggi yang memiliki kekuasaan

langsung untuk membuat dan mengesahkan kebijakan..

2. Lapisan Menengah (Middle Layer/Secondary Stakeholder):

Pelaksana Kebijakan: Birokrasi menengah, instansi pelaksana, dan badan-badan pemerintah yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan.

3. Lapisan Luar (Outer Layer/Wider Stakeholder):

Media dan Jurnalis: Berperan dalam menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan memberikan tekanan terhadap pengambil keputusan. Masyarakat Sipil: Warga negara, komunitas lokal, dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam partisipasi publik melalui konsultasi, survei, dan forum-forum dialog.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. sumber informasi yang dimaksud adalah jurnal, buku, koran dan sumber informasi lainnya yang akan ada kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penerapan kota tanpa kumuh pada Kabupaten Subang dengan program kota tanpa kumuh terdapat beberapa stakeholders yang terkait didalamnya sehingga membentuk suatu kesatuan yang saling melengkapi sehingga dapat mewujudkan jejaring tersendiri pada suatu program kebijakan.

Program Tanpa Kumuh tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan permukiman dan peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan menengah. selain regulasi kebijakan tersebut pemerintah kota subang juga mengeluarkan kebijakan tentang implementasi program KOTAKU dengan SK Bupati Kabupaten Subang Nomor : 633/Kep.418-Distarkimsih 162/2014 Tanggal 30 Oktober 2014.

Dalam terjadinya jejaring kebijakan antar aktor maupun stakeholders memiliki fokus terhadap peluang dan menilai kebutuhan antar stakeholder. hasil identifikasi menunjukan bahwa kebijakan program KOTAKU di Kabupaten Subang memiliki temuan penelitian dengan mendeskripsikan jejaring kebijakan dengan model Onion.

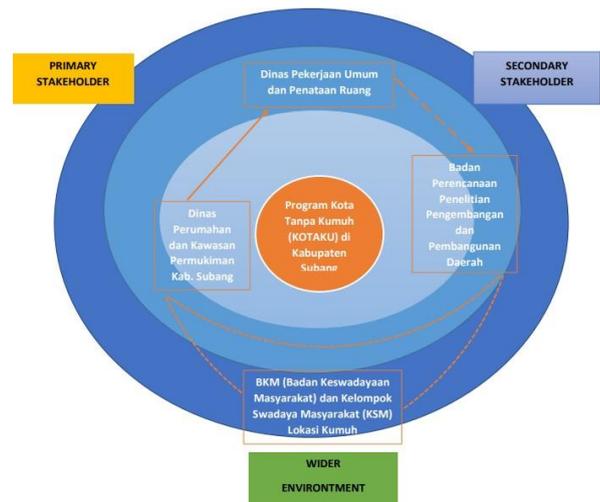
Dimana hubungan antar aktor saling bersinggungan dalam proses membuat suatu kebijakan pada program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam kebijakan ini melibatkan interaksi dan kolaborasi antar aktor. pada model onion atau lapisan bawang menghubungkan beberapa lapisan antar aktor sebagai lapisan-lapisan yang saling berinteraksi. pada kebijakan program KOTAKU ini terdapat beberapa aktor yang berperan langsung dalam pembentukan kebijakan Kota Tanpa Kumuh, yaitu ;

1. Koordinator Perencanaan : Bappeda bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, termasuk program KOTAKU. Mereka bekerja sama dengan aktor utama, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, untuk memastikan rencana penanganan kawasan kumuh sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan daerah secara keseluruhan
2. Penganggaran dan Pendanaan: Bappeda terlibat dalam proses penganggaran dan alokasi dana untuk program KOTAKU. Mereka membantu memastikan bahwa sumber daya keuangan yang diperlukan tersedia dan

- dialokasikan secara efisien untuk mencapai tujuan program.
3. **Monitoring dan Evaluasi:** Bappeda berperan dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program KOTAKU. Mereka mengumpulkan data dan melakukan analisis untuk menilai efektivitas program serta memberikan rekomendasi perbaikan.
 4. **Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat:** Bappeda juga mendukung kegiatan sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU. Mereka membantu menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.
 5. **Sinergi Antar Sektor:** Bappeda mendorong sinergi antar sektor dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa penanganan kawasan kumuh dilakukan secara terpadu dan menyeluruh. Mereka memfasilitasi kerjasama antara berbagai dinas, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya

6. **Penyusunan Kebijakan dan Regulasi:** Bappeda membantu dalam penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan program KOTAKU. Mereka memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan rencana pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan lokal.

Gambar Analisis Jejaring Kebijakan Stakeholders dengan model Onion



Hubungan antar stakeholder Program KOTAKU Kabupaten Subang

Primary Stakeholders	Secondary Stakeholders	Wider Stakeholders
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan	Dinas Pekerjaan Umum dan	Badan Keswadayaan

Kawasan Permukiman (PKP) Kab. Subang (PS1)	Penataan Ruang (SS1)	Masyarakat (BKM) (WS1)
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) (SS2)	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lokasi Permukiman Kumuh (WS2)

1. **PS1** yaitu Dinas Permukiman dan Tataruang DISPERKIM sebagai primary memiliki hubungan yang **sangat kuat** dengan **SS1** yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tataruang, **terkait** pemetaan ruang untuk pembangunan permukiman tanpa kumuh di Kabupaten Subang. PS1 melakukan pendataan terhadap kawasan kumuh di Kabupaten Subang. Data tersebut kemudian diserahkan kepada SS1 untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Berdasarkan data tersebut, SS1 menyusun rencana tata ruang untuk permukiman tanpa kumuh.

2. **PS1** yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Tataruang Kab. Subang sebagai primary yang bertugas sebagai pelaksana program KOTAKU di lapangan memiliki hubungan yang **kurang kuat** dengan **SS2** yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertugas sebagai perencana dan pemberi masukan bagi pelaksanaan program KOTAKU yang dimana terdapat kolaborasi dan sinergi antara PS1 dan SS2. PS1 melakukan pendataan terhadap kawasan kumuh di Kabupaten Subang. Data tersebut kemudian diserahkan kepada SS2 untuk dianalisis dan dikaji. Berdasarkan hasil analisis dan kajian, SS2 menyusun rencana program KOTAKU untuk Kabupaten Subang. PS1 kemudian melaksanakan program KOTAKU berdasarkan rencana yang telah disusun oleh SS2. SS2 melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program KOTAKU oleh PS1.

3. **PS1** yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Subang sebagai primary yang berperan sebagai fasilitator,

regulator, dan pemberi dana dalam program KOTAKU memiliki hubungan yang **kurang kuat** dengan **WS1** yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat yang berperan dalam pendampingan dan pemberdayaan KSM dan **WS2** yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lokasi Permukiman Kumuh yang berperan sebagai pelaksana program KOTAKU di wilayahnya. PS1 melakukan pendataan terhadap kawasan kumuh di Kabupaten Subang. Data tersebut kemudian diserahkan kepada WS1 untuk dikaji dan dianalisis. Berdasarkan hasil analisis dan kajian, WS1 memfasilitasi pembentukan KSM di kawasan kumuh tersebut. WS1 kemudian memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada KSM. KSM menyusun rencana program KOTAKU untuk wilayahnya. PS1 memberikan dana kepada KSM untuk melaksanakan program KOTAKU. WS1 melakukan pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan program KOTAKU oleh KSM. WS2

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program KOTAKU.

4. **SS1** yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai secondary memiliki hubungan yang **cukup kuat** dengan **SS2** yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah **terkait** teknis perencanaan pembangunan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). SS1 dan SS2 memiliki peran yang saling melengkapi dalam teknis perencanaan pembangunan program KOTAKU. SS1 berperan dalam perencanaan teknis pembangunan infrastruktur di kawasan kumuh. SS2 berperan dalam perencanaan strategis dan kebijakan pembangunan program KOTAKU. SS2 melakukan analisis dan kajian terhadap data kawasan kumuh di Kabupaten Subang. Berdasarkan hasil analisis dan kajian, SS2 menyusun strategi dan kebijakan pembangunan program KOTAKU. SS2 kemudian berkoordinasi dengan SS1 untuk membahas perencanaan teknis pembangunan infrastruktur di kawasan kumuh. SS1 menyusun perencanaan teknis pembangunan

infrastruktur yang sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan program KOTAKU.

5. **SS2** yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai secondary yang berperan sebagai penyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan program KOTAKU memiliki hubungan yang **kurang kuat** dengan **WS1** yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat yang berperan dalam pendampingan dan pemberdayaan KSM dan **WS2** yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lokasi Permukiman Kumuh yang berperan sebagai pelaksana program KOTAKU di wilayahnya. SS2 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program KOTAKU. WS1 membantu WS2 dalam mengakses sumber-sumber pendanaan untuk melaksanakan program KOTAKU.
6. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan Kelompok swadaya masyarakat (KSM) Lokasi Kumuh sebagai **Wider Environment** memiliki hubungan secara **tidak langsung** terhadap Dinas-dinas yang bersangkutan

terkait pembangunan PROGRAM KOTAKU. BKM menyusun rencana program KOTAKU untuk wilayahnya. BKM kemudian menyerahkan rencana program tersebut kepada WS1 untuk mendapatkan persetujuan. WS1 berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk mendapatkan dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan program KOTAKU. WS1 kemudian memberikan arahan dan bimbingan kepada BKM dalam melaksanakan program KOTAKU. BKM melibatkan KSM dalam pelaksanaan program KOTAKU. WS1 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program KOTAKU oleh BKM dan KSM

SIMPULAN

Model onion jejaring kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan Program KOTAKU di Kabupaten Subang bergantung pada sinergi antara berbagai lapisan kebijakan dan pelaksanaan, mulai dari partisipasi masyarakat hingga dukungan kebijakan pemerintah dan kerjasama dengan pihak eksternal. Pendekatan holistik dan integratif ini

mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan layak huni bagi warga, serta menunjukkan pentingnya kolaborasi multi-stakeholder dalam mengatasi permasalahan perkotaan.

REFERENSI

- Afriandi, Z. (2018). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Pembangunan Kawasan Kumuh di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru [UIN SUSKA RIAU].
- Azzahra, S. A. (2020). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kota Sukabumi (Studi Kasus Kecamatan Citamiang). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 26–33.
- Christianingrum, S. I., & Djumiarti, T. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Semarang Timur. *Journal of Public Policy and Management*
- Fadilah, N., & Rahmawati, A. (2021). Analisis Jejaring Kebijakan dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Sukahaji Kota Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 5(1), 220-226. *Review*, 8(2), 88–105.
- Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.
- Salindri, F. F. (2023). Analisis Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Indonesia. *GEOSEE*, 4(1), 7-12.
- Tardiyo, D. (2020). Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dikabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 260-267.
- Ramadhan, F. (2022). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur (Doctoral Dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro).